



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa/kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMDesa/Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngoro-oro dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngoro-oro.
5. Lurah adalah Lurah Ngoro-oro Kapanewon Patuk.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJMDesa/Kalurahan Tahun 2018 -2024.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

BAB II SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2022 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan

Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2022

Bab V Penutup

- (2) RPKKalurahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 15 Oktober 2021
LURAH,

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 15 Oktober 2021

CARIK,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa/Kalurahan mengenai potensi Kalurahan

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan kalurahan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJMDesa/Kalurahan) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDesa/Kalurahan) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. Potensi Sumberdaya kalurahan

Potensi Kalurahan Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Susunan Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Kesadaran Masyarakat untuk membangun yang cukup tinggi.
- e. Jiwa kegotongroyongan yang masih ada.
- f. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- h. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- i. Banyaknya masyarakat usia produktif.

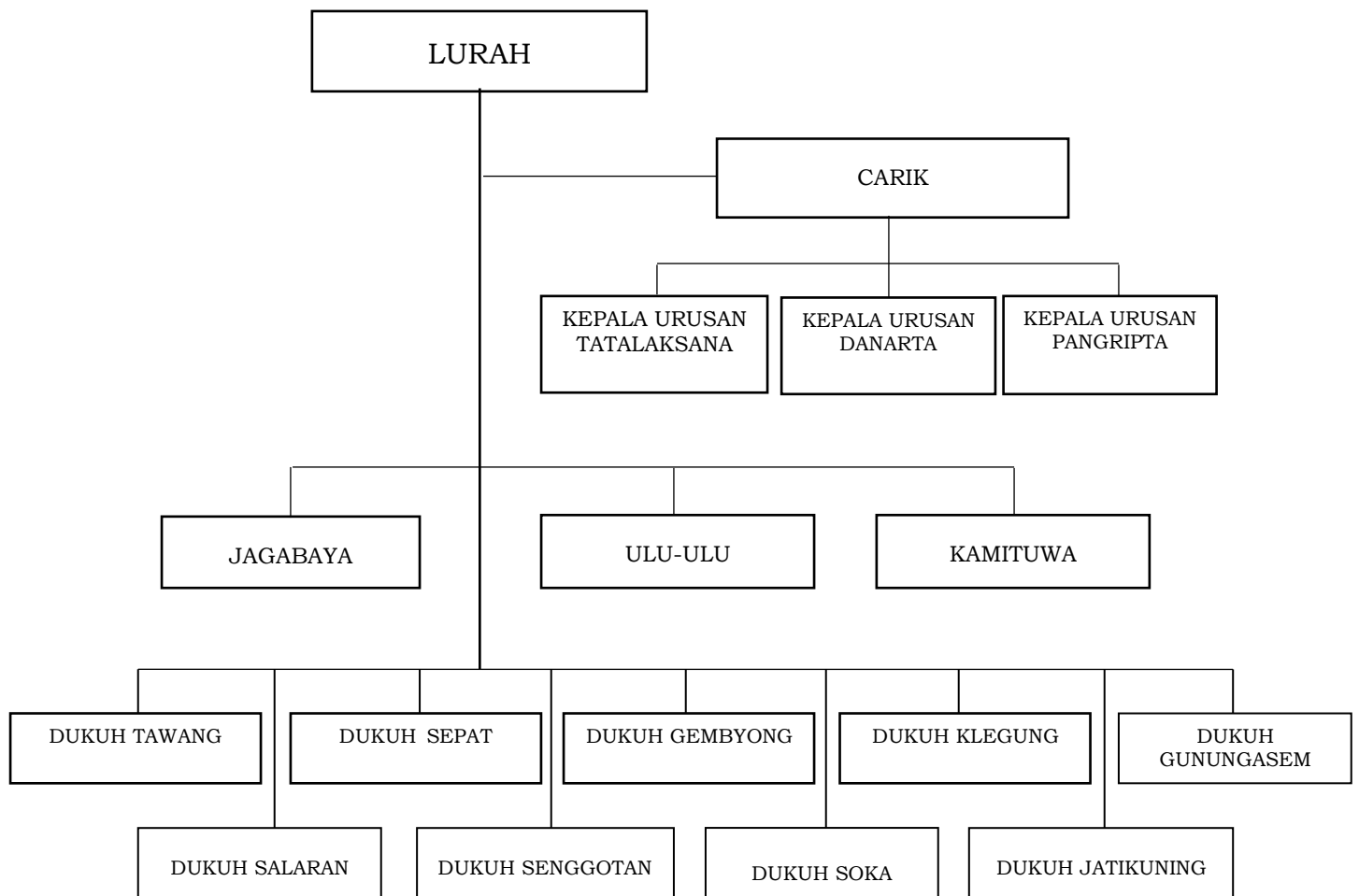
Disisi lain permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
 - b. Belum 100 % masyarakat dapat menikmati listrik.
 - c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
 - d. Banyak akses jalan yang belum memadai.
 - e. Pungutan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
 - f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
 - g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
 - h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
 - i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
 - j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional.
 - k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah.
 - l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 9 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



4. Pengertian RPKKalurahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RPKKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa/Kalurahan.

5. Fungsi RPKKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan

Tersedianya dokumen RPKKalurahan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APBDesa/Kalurahan) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

6. Proses penyusunan RPKKalurahan

Penyusunan Perencanaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses

perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat kalurahan yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun kalurahan. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

7. Keterkaitan RPKKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya :
 - a. RPKKalurahan dengan RPJMKalurahan
RPKKalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa/Kalurahan.
 - b. RPKKalurahan dengan RAPBKalurahan
RPKKalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan
 - c. RPKKalurahan dengan DURPKKalurahan
RPKKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DURPKKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon (musrenbang) kapanewon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istomewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

C. Tujuan

1. Tujuan

RKPKalurahan disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pemerintah kalurahan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Kalurahan Tahun 2021 sumber pendanaannya dari APBKalurahan.
- b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2023 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui panewu sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2024 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPKalurahan meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

D. Visi dan Misi Kalurahan.

1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa/kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pamong kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kopentesi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistim keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Ngoro-oro sebagai berikut:

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja pamong sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi 3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya 2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel 2. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Ngoro-oro berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo
Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Ketinggian tanah di Kalurahan Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24°C sampai dengan 34°C.

Dengan demikian Kalurahan Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Memuat arah kebijakan kalurahan Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN NGORO-ORO
TAHUN 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2021)	Proyeksi (n-1/2022)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	7,446,500	6,600,000	
4 1 1	Hasil Usaha	4,000,000	4,500,000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	4,000,000	4,500,000	
4 1 2	Hasil Aset	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa			
4 1 2 3	Pasar Desa			
4 1 2 7	Kios Milik Desa			
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa			
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;			
4 1 2 91	Balai desa	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 92	Kantor desa;			

4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	2,096,500	750,000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;			
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa			
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa	1,346,500		
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa			
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	750,000	750,000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa			
4 2	Transfer	1,657,290,800	1,635,949,800	
4 2 1	Dana Desa	830,145,000	830,145,000	
4 2 1 1	Dana Desa	830,145,000	830,145,000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	53,820,000	49,688,500	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	49,688,500	49,688,500	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4,131,500		
4 2 3	Alokasi Dana Desa	693,325,800	693,325,800	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	693,325,800	693,325,800	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	80,000,000	62,790,500	
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	80,000,000	62,790,500	
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa			
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa			
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya			
4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota			
4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades			

4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa			
4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 3	Pendapatan Lain	39,000,000	54,000,000	
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	35,000,000	50,000,000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	35,000,000	50,000,000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-		
4 3 6	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 6 1	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	-	-	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB			
4 3 9 91	Hadiah perlombaan			
	JUMLAH PENDAPATAN	1,703,737,300	1,696,549,800	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan prioritas belanja kalurahan tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2021)	Proyeksi (n-1/2022)	

5.	BELANJA			
5.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3,221,309,966.00	920,920,100.00	
5.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	759,194,210.00	766,168,300.00	
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,500,000.00	40,950,000.00	ADD, PAD, PBH
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	545,827,200.00	553,209,700.00	ADD, PAD, PBH
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,121,288.00	40,308,524.00	ADD
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61,555,722.00	58,770,076.00	ADD
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	47,240,000.00	47,240,000.00	ADD
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,440,000.00	7,180,000.00	ADD
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18,510,000.00	18,510,000.00	PBH, DLL
5.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107,948,258.00	77,055,500.00	
5.1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6,800,000.00	1,500,000.00	DLL
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,565,000.00	2,565,000.00	DLL
5.1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	81,083,258.00	62,790,500.00	DLL, PBP
5.1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	6,200,000.00	-	DLL
5.1.2.91	Pengadaan mebeleur	3,000,000.00	3,900,000.00	DLL
5.1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3,300,000.00	2,300,000.00	ADD, DLL
5.1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3,500,000.00	4,000,000.00	ADD, PAD
5.1.2.96	Pengadaan mesin/kartu absensi	1,500,000.00	-	ADD
5.1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11,271,500.00	10,500,000.00	
5.1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4,300,000.00	4,300,000.00	PBH
5.1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3,671,500.00	2,500,000.00	PAD, PBH
5.1.3.90	Penyusunan monografi desa	1,000,000.00	1,200,000.00	ADD
5.1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,300,000.00	2,500,000.00	DDS, DLL, PAD

5.1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90,922,350.00	67,196,300.00	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,800,000.00	9,150,000.00	PBH, DLL
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5,722,150.00	6,425,300.00	PBH
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,375,000.00	3,375,000.00	ADD, DLL
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6,925,000.00	7,055,000.00	PBH, DLL
5.1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,400,000.00	2,400,000.00	PBH
5.1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,225,000.00	2,225,000.00	PBH, PAD
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,950,000.00	1,950,000.00	PBH, DLL
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	37,416,500.00	30,416,000.00	DDS
5.1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2,500,000.00	2,500,000.00	DLL
5.1.4.91	Pengisian perangkat desa	19,608,700.00		PBH
5.1.4.91	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan		1,700,000.00	DLL
5.1.5.	Sub Bidang Pertanahan	2,251,973,648.00	-	
5.1.5.90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	2,251,973,648.00	-	DLL, PAD
5.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	468,441,500.00	627,981,000.00	
5.2.1.	Sub Bidang Pendidikan	18,300,000.00	40,592,000.00	
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18,300,000.00	32,492,000.00	DDS
5.2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	-	3,000,000.00	DDS
5.2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	-	5,100,000.00	DDS
5.2.2.	Sub Bidang Kesehatan	165,747,500.00	183,207,500.00	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	93,140,000.00	93,140,000.00	DDS
5.2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	-	4,600,000.00	DDS

5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,837,500.00	9,837,500.00	DDS
5.2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9,980,000.00	17,630,000.00	DDS
5.2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	35,040,000.00	33,750,000.00	DDS
5.2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	-	6,500,000.00	DDS
5.2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	17,750,000.00	17,750,000.00	DDS
5.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240,919,000.00	316,543,500.00	
5.2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa		151,543,500.00	DDS
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	240,919,000.00	155,000,000.00	DDS
5.2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		4,000,000.00	DDS
5.2.3.92	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa		6,000,000.00	DDS
5.2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38,475,000.00	77,638,000.00	
5.2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		36,078,000.00	DDS
5.2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	38,475,000.00	41,560,000.00	DDS
5.2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5,000,000.00	10,000,000.00	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5,000,000.00	5,000,000.00	DDS
5.2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	5,000,000.00	DDS
5.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	130,084,320.00	52,276,200.00	
5.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	90,936,500.00	15,960,500.00	
5.3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6,230,000.00	4,500,000.00	DLL
5.3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		4,610,000.00	DLL
5.3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat		2,850,000.00	DLL

5.3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,706,500.00	4,000,500.00	PBH, PAD
5.3.1.93	Pembinaan Jaga Warga	80,000,000.00		PBP
5.3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13,881,500.00	13,881,500.00	
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6,181,500.00	6,181,500.00	DLL
5.3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7,700,000.00	7,700,000.00	DLL
5.3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,029,650.00	6,029,650.00	
5.3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1,180,000.00	1,180,000.00	DLL
5.3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,939,650.00	2,939,650.00	PAD, DLL
5.3.3.93	Operasional Karang Taruna	1,910,000.00	1,910,000.00	PBH
5.3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19,236,670.00	16,404,550.00	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,832,500.00	-	DLL
5.3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5,250,000.00	5,250,000.00	DDS
5.3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4,533,470.00	4,533,850.00	DLL
5.3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1,810,000.00	1,810,000.00	PBH
5.3.4.96	Operasional PKK	4,810,700.00	4,810,700.00	PBH
5.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	89,865,500.00	121,824,000.00	
5.4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	14,326,000.00	
5.4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		14,326,000.00	DDS
5.4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	3,945,000.00	
5.4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan		3,945,000.00	DDS
5.4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	7,125,000.00	
5.4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)		7,125,000.00	DDS
5.4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,462,500.00	6,625,000.00	
5.4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3,462,500.00	6,625,000.00	PBH, DDS

5.4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	86,403,000.00	89,803,000.00	
5.4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86,403,000.00	86,403,000.00	PAD
5.4.7.92	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa		3,400,000.00	DDS
5.5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	345,197,463.00	86,077,000.00	
5.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	97,997,463.00	22,377,000.00	
5.5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	97,997,463.00	22,377,000.00	DDS
5.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	2,500,000.00	
5.5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	-	2,500,000.00	DDS
5.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	247,200,000.00	61,200,000.00	
5.5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	247,200,000.00	61,200,000.00	DDS
	JUMLAH BELANJA	4,254,898,749.00	1,809,078,300.00	

3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2021)	Proyeksi (n-1/2022)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	2,551,161,449	162,528,500	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	2,551,161,449	162,528,500	
6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	2,551,161,449	162,528,500	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	50,000,000	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	

6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	-	50,000,000	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	-	50,000,000	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			

BAB III

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RPKKALURAHAN TAHUN 2021

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih banyak program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh kalurahan;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMKalurahan yang lebih mendesak yaitu untuk kegiatan PPKM pada penanggulangan bencana non alam (pandemi COVID-19) dan kegiatan penanganan stunting.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKalurahan

1. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas kalurahan belum semuanya bisa terdani karena perubahan kebijakan pemerintah untuk difokuskan kegiatan penanggulangan bencana non alam (COVID-19) dan kegiatan pencegahan stunting.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2022

Prioritas program kegiatan skala kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan melalui dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 2. Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
 5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- Prioritas program kegiatan skala Kalurahan Tahun 2022 disajikan dalam tabel 4.1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2023, dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.2.

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam peyusunan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKPKalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Kalurahan diantaranya : Pemerintah Kalurahan, BPK, LKD, KPMK, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUMKal, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah kalurahan dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKPKalurahan.

Dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 15 Oktober 2021
Lurah,

ttd

SUKASTO

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

No	Uraian	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2021	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2021	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2021	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket.	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			100%	13.1%	91%	0	2,258,994,500	38,541,500	716,159,210	0	0	56,709,600	13,731,250	135,673,906	
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			100%	50.71%	99%	0	35,700,000	0	704,984,210	0	0	18,510,000	0	0	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	100%	52.87%	100%	0	2,700,000	0	37,800,000	0	0	0	0	0	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	100%	51.55%	100%	0	33,000,000	0	512,827,200	0	0	0	0	0	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	100%	46.82%	99%	0	0	0	38,121,288	0	0	0	0	0	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya beban Oprasional Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	100%	21.69%	98%	0	0	0	61,555,722	0	0	0	0	0	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	100%	53.01%	100%	0	0	0	47,240,000	0	0	0	0	0	

	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Lancarnya beban Oprasional Bamuskal	Kalurahan	100%	2.02%	98%	0	0	0	7,440,000	0	0	0	0	0
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terbayarnya insentif RT/RW	Kalurahan	100%	33.33%	100%	0	0	0	0	0	0	18,510,000	0	0
2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			100%	19.68%	81%	0	-	0	6,800,000	0	0	-	-	99,648,258
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Arsip kalurahan tertata dengan baik	Kalurahan	100%	70.59%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Gedung/ kantor yang lebih nyaman	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,000
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor pelayanan umum yang lebih nyaman	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	81,083,258
	4	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya alat kerja (laptop, printer, proyektor)	Kalurahan	100%	27.42%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
	5	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang siap pakai	Kalurahan	100%	5.51%	80%	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0
	7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Peralatan kerja yang siap pakai	Kalurahan	100%	53.94%	85%	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0
	8	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Tersedianya mesin absensi	Kalurahan	100%	0.0%	85%	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0

3.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			100%	23.15%	81%	0	3,671,500	1,125,000	1,000,000	0	0	4,300,000	0	1,175,000	
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dokumen kependudukan dan potensi kalurahan	Kalurahan	100%	0%	50%	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	0	
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertatanya dokumen/arsip yang baik	Kalurahan	100%	0%	75%	0	3,671,500	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penyusunan monografi desa	Dokumen monografi kalurahan yang informatik	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Basis data terpadu RTM	Kalurahan	100%	92.61%	100%	0	0	1,125,000	0	0	0	0	0	1,175,000	
4.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			100%	43.31%	94%	0	-	37,416,500	3,375,000	0	0	33,899,600	13,731,250	2,500,000	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen perencanaan kalurahan yang partisipatif	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0	
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Data RTM yang akurat dan pengelolaan BUMDes yang akuntabel	Kalurahan	100%	89.51%	100%	0	0	0	0	0	0	5,490,900	231,250	0	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen RKP Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	3,375,000	0	0	0	0	0	

4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dokumen keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	33.57%	100%	0	0	0	0	0	0	0	6,925,000	0
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terbayarnya honor petugas aset	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Dokumen Perkal Aset Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	50%	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	0
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	LPPK, LKPK dan IPPK	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Akses informasi desa lebih baik	Kalurahan	100%	84.57%	100%	0	0	37,416,500	0	0	0	0	0	0
9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Dokumen laporan keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	30%	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
10	Pengisian Perangkat desa	Terdapatnya Dukuh Gembyong secara definitiv	Kalurahan	100%	95.41%	100%	0	0	0	0	0	0	19,608,700	0	0
5.	Sub Bidang Pertanahan			100%	0%	100%	0	2,219,623,000	0	0	0	0	0	0	32,350,648
1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Tersedianya pengganti tanah desa	Kalurahan	100%	0%	100%	0	2,219,623,000	0	0	0	0	0	0	32,350,648
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			83%	13.50%	44%	0	0	1,303,992,160	0	0	0	0	0	0
1.	Sub Bidang Pendidikan			100%	29.69%	33%	0	0	18,300,000	0	0	0	0	0	0
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor Guru PAUD dan TK	Kalurahan	100%	49.51%	100%	0	0	18,300,000	0	0	0	0	0	0

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			100%	10.46%	72%	0	2,939,650	5,250,000	0	80,000,000	0	9,335,000	13,237,200	28,657,470
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			100%	7.89%	97%	0	0	0	0	80,000,000	0	9,335,000	4,706,500	6,230,000
	1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Satuan Linmas yang lebih baik	Kalurahan	100%	23.68%	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,000
	2 Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Lembaga yang siaga menghadapi bencana	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	4,706,500	0
	3 Pembinaan Jaga Warga	Terbinanya pengurus jaga warga	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	80,000,000	0	9,335,000	0	0
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			100%	26.62%	31%	0	-	0	0	0	0	0	0	13,881,500
	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Honor pelatih kesenian	Kalurahan	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Terkirimnya kontingen grup kesenian	Kalurahan	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Terlaksnannya HUT RI dan Hari Jadi kab. Gunungkidul	Kalurahan	100%	6.47%	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,500
	4 Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Terbinanya ustadz dan rois serta terlaksananya safari ramadhan	Kalurahan	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			100%	10%	60%	0	2,939,650	0	0	0	0	0	1,910,000	1,180,000

	1	Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Los Pasar Kalurahan	Kalurahan	100%	0%	100%	0	86,403,000	0	0	0	0	0	0	0
V		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100%	72.68%	100%	0	0	345,197,463	0	0	0	0	0	0
1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			100%	61.68%	100%	0	0	97,997,463	0	0	0	0	0	0
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bencana yang tertangani	Kalurahan	100%	41.00%	100%	0	0	97,997,463	0	0	0	0	0	0
2.		Sub Bidang Keadaan Darurat			0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Penanganan Keadaan Darurat	Terlaksananya kegiatan keadaan darurat	Kalurahan	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			100%	73.85	100%	0	0	247,200,000	0	0	0	0	0	0
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Pemberian BLT-DD	Kalurahan	100%	49.76	100%	0	0	247,200,000	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

KALURAHAN : NGORO-ORO
KAPANEWON : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu	Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan	Rencana
----	--------------------------------------	--------	--------	-----------------	-------	-----------------------------	------------------	---------

	Bidang	Jenis Kegiatan				Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Pelaksanaan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							766,168,300					
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan	13 OB	Lurah	12 bulan	40,950,000	ADD,PBH	√			Januari - Desember	
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan	252 OB	Pamong dan Staf Pamong Kalurahan	12 bulan	553,209,700	ADD,PBH	√			Januari - Desember	
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan	252 OB	Lurah, Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	40,308,524	ADD	√			Januari - Desember	
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	58,770,076	ADD	√			Januari - Desember	
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan	117 OB	Anggota BPK	12 bulan	47,240,000	ADD	√			Januari - Desember	
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan	1 Ls	Anggota BPK	12 bulan	7,180,000	ADD	√			Januari - Desember	
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	612 OB	Ketua RT/RW	12 bulan	18,510,000	DLL	√			Januari - Desember	
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa							80,055,500					
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,500,000	DLL	√			Juni	
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,565,000	DLL	√			Juli	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	62,790,500	PBP			√	Juni - Juli	
	4	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	3,000,000	DLL	√			Agustus	
	5	Pengadaan mebeleur	Kalurahan	6 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	3,900,000	DLL	√			Juli	
	6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,300,000	DLL	√			Januari - Desember	

	7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	4,000,000	PAD	√			Januari - Desember
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						10,500,000					
	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	4,300,000	PBH	√			Juli, Desember
	2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,500,000	PBH	√			Pebruari
	3	Penyusunan monografi desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,200,000	ADD	√			Juli, Desember
	4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,500,000	PAD	√			Januari/Pebruari
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						67,196,300					
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	3 bulan	9,150,000	DLL	√			Juli, September, Desember
	2	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	2 bulan	6,425,300	PBH	√			Pebruari, November
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	2 bulan	3,375,000	DLL	√			Oktober, November
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	7,055,000	DLL	√			Januari, Agustus, Desember
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan	36 OB	Petugas Aset	4 bulan	2,400,000	PBH	√			Januari - Desember
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	2,225,000	PAD	√			Juni, Agustus, Oktober
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	3 bulan	1,950,000	DLL	√			Januari - Maret
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Pengelola SID	12 bulan	30,416,000	DDS	√			Januari - Desember
	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,500,000	DLL	√			Januari - Desember
	10	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan	2 kali	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,700,000	DLL	√			Juli, November
5	Sub Bidang Pertanahan						5,000,000					
	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan	1 paket	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	-	PAD, DLL	√			Agustus
	2	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Kalurahan	1 paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	5,000,000	DLL			√	Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 1							928,920,100					

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1	Sub Bidang Pendidikan						40,292,000				
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	96 OB	Guru PAUD/TK	12 bulan	26,492,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kalurahan	1 Ls	Guru PAUD/TK	1 bulan	3,000,000	DDS	√			Mei
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Pengelola perustakaan dan Masyarakat	1 bulan	5,700,000	DDS	√			Maret, April
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	24 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	5,100,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Sub Bidang Kesehatan						178,207,500				
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	1104 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	93,140,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dll)	Kalurahan	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	4,600,000	DDS	√			Januari - Desember
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	9,837,500	DDS	√			Januari - Desember
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	12,630,000	DDS	√			Maret, Mei, September
5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan	562 OB	Kader Posbindu	12 bulan	29,750,000	DDS	√			Januari - Desember
6	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan	175 Anak	Anak Balita/PAUD	3 bulan	6,500,000	DDS	√			April, Agustus, Desember
7	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	15,750,000	DDS	√			Januari - Desember
8	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	6,000,000	DDS	√			Maret
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						316,543,500				
1	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Soka	p 245 m / 78.90 m3	Masyarakat	2 bulan	151,543,500	DDS	√			Juli - Agustus
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			Masyarakat		-	DDS	√			
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Tawang	p 39.0 m / 128.19 m3	Masyarakat	2 bulan	155,000,000	DDS	√			Agustus - September
4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat	2 bulan	4,000,000	DDS	√			April - Mei
5	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	-	DDS			√	Juni - Juli

	6	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Padukuhan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	-	DLL	√			Mei - Juli	
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat	3 bulan	-	DDS	√			April - Juni	
	8	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	6,000,000	DDS	√			Mei - Juli	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman							57,638,000					
	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			Masyarakat		-	DDS	√				
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Kalurahan	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	16,078,000	DDS	√			Juni - Juli	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll)	Kalurahan		Masyarakat		-	DDS	√				
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalurahan		Bank Sampah		-	DDS	√			Oktober - November	
	5	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan	11 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	41,560,000	DDS	√			Juli - September	
	6	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Kalurahan		Bank Sampah dan Masyarakat			DDS	√				
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							10,000,000					
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	5,000,000	DDS	√			Januari - Desember	
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	5,000,000	DDS	√			Januari - Desember	
5	Sub Bidang Pariwisata							4,000,000					
	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Pokdarwis, Pengelola wisata dan Masyarakat	2 bulan	8,000,000	DDS	√			April, Mei	
	2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	1 bulan	4,000,000	DDS	√			September	
Jumlah Per Bidang 2							606,681,000						
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							15,960,500					
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan	1 Ls	Linmas kalurahan	4 bulan	4,500,000	DLL	√			Maret, Juni, September, Desember	
	2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan	1 Ls	KSB, Sibat dan Monji	1 bulan	4,610,000	DLL	√			Maret	
	3	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	2,850,000	DLL	√			Maret	

	4	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	1 Ls	FPRB	1 bulan	4,000,500	PAD	√			Juli	
	5	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan	1 Ls	Pengurus Jaga Warga	2 bulan	-	PBH	√			Pebruari, Juli	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							10,881,500					
	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan		Pelatih kesenian		-	PAD	√				
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	6,181,500	DLL	√			Juni - Agustus	
	3	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan	1 Ls	Jamaah masjid/musholla	1 bulan	4,700,000	DLL	√			Juli	
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							6,029,650					
	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan		Pemuda/ Karang taruna		-	DLL	√				
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	1,180,000	DLL	√			Januari - Desember	
	3	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	1 bulan	2,939,650	DLL	√			Mei / September	
	4	Operasional Karang Taruna	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	1,910,000	PBH	√			12 bulan	
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							16,404,550					
	1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan	24 OB	KPM	12 bulan	5,250,000	DDS	√			Januari - Desember	
	2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan	1 Ls	Tim KPCKal	12 bulan	4,533,850	DLL	√			Januari - Desember	
	3	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan	1 Ls	LPMP dan LPMK	12 bulan	1,810,000	PBH	√			Januari - Desember	
	4	Operasional PKK	Kalurahan	1 Ls	PKK	12 bulan	4,810,700	PBH	√			Januari - Desember	
Jumlah Per Bidang 3							49,276,200						
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						3,625,000					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan	9 Unit	Masyarakat	2 bulan	11,326,000	DDS	√			Juni -Juli	
	2	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	3,625,000	DDS	√			Juni - Agustus	
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						7,945,000					
	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	12,000,000	DDS	√			Agustus - Oktober	
	2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	4,000,000	DDS	√			Juni	

	3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan	1 Ls	Angota Kelompok Tani / Gapoktan	1 bulan	3,945,000	DDS	√			September	
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							7,125,000					
	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan	1 Ls	Penyandang difabel	1 bulan	7,125,000	DDS	√			Oktober / November	
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							3,000,000					
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan	2 kali	Pengurus BUMKal	2 bulan	3,000,000	DDS	√			Mei, September	
5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							92,803,000					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	86,403,000	PAD	√			Agustus - September	
	2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif ***)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	3,000,000	DDS	√			Oktober	
	3	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Kalurahan	1 Ls	Pengelola BUMDes, Pengelola Pasar	1 bulan	3,400,000	DDS	√			November	
Jumlah Per Bidang 4							114,498,000						
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA												
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						22,377,000					
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	22,377,000	DDS	√			Januari - Desember	
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat						2,500,000					
	1	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	2,500,000	DDS	√			Januari - Desember	
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa						61,200,000					
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	61,200,000	DDS	√			Januari - Desember	
Jumlah Per Bidang 5							86,077,000						
JUMLAH TOTAL							1,785,452,300						
6	PEMBIAYAAN												
	2	Pengeluaran Pembiayaan						50,000,000					
	1	Penyertaan Modal BUMDes Bersama	Kalurahan	1 Ls			50,000,000	DDS	√				

Tabel 4.2
DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN) TAHUN 2023
SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2024

KALURAHAN
KAPANEWON

: NGORO-ORO
: PATUK

KABUPATEN
PROPINSI

: GUNUNGKIDUL
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	BIDANG	NAMA KAMUS/ USULAN PERMASALAHAN	URUSAN	DEVINISI OPERASIONAL/ SYARAT & KETENTUAN	OPD	KET.
1	Bidang Ekonomi	Bimtek penanganan hewan dan daging qurban	Pertanian	1) 1 desa 25 takmir atau petugas pengawas hewan qurban; 2) mengajukan proposal kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PIS
2	Bidang Fisik Prasarana	Pembinaan Kelompok peduli lingkungan (Proklim)	Lingkungan Hidup	- Ada kelompok yang sudah mempunyai legalitas (Bank Sampah, kelompok tani, dll) '- Tokoh penggerak di lokasi ProKlim '- Pendamping/Fasilitator Desa	Dinas Lingkungan Hidup	PIS
3	Bidang Fisik Prasarana	Cermin Tikung	Perhubungan	Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan	PIS
4	Bidang Fisik Prasarana	Pemasangan Rambu F	Perhubungan	Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan	PIS
5	Bidang Fisik Prasarana	Rambu standar	Perhubungan	Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan	PIS
6	Bidang Fisik Prasarana	Penyediaan sarana prasarana informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Rawan bencana. Memiliki titik rawan ancaman bencana. Belum mempunyai fasilitas rambu yang terpasang di titik lokasi yang sama Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PIS
7	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Sosialisasi Kebijakan Adminduk	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	1. Peserta sosialisasi 75 orang per-kalurahan; 2. Satu paket untuk satu Kalurahan; 3. Unsur peserta terdiri dari Ketua RT, Pengurus PKK, serta Perangkat Kelurahan yang berkaitan dengan Adminduk; 5. Lokasi pelaksanaan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PIS

8	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Desa	Perpustakaan	Perpustakaan yang telah melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PIS
9	Bidang Ekonomi	Pembinaan Promosi dan Pemasaran bagi UMKM	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan kegiatan bertujuan memberikan pembinaan bagi UMKM di bidang promosi dan pemasaran. Peserta dilatih bagaimana cara mempromosikan produk, strategi pemasaran dan etika dalam berbisnis. 1. mengajukan proposal. Contoh proposal dapat dilihat di aplikasi e-musren. 2. menu dokumen informasi-dokumen pendukung. 3. jumlah peserta 30 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 4. peserta dalam usia produktif dan mempunyai usaha. 5. kegiatan dilaksanakan selama 1 hari	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	PIWK
10	Bidang Ekonomi	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	penyelenggaraan kegiatan bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dibidang digital marketing 1. mengajukan proposal. Contoh proposal dapat dilihat di aplikasi e-musren. 2. menu dokumen informasi-dokumen pendukung. 3. jumlah peserta 30 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 4. peserta dalam usia produktif dan mempunyai usaha/produk. 5. kegiatan dilaksanakan selama 3 hari. 6. Diutamakan untuk lokasi yang jaringan internetnya lancar.	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	PIWK
11	Bidang Fisik Prasarana	Pembangunan talud	Pekerjaan umum	1 Ruas Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIWK

12	Bidang Fisik Prasarana	Pembangunan drainase	Pekerjaan umum	1 Ruas Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PIWK
13	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial sebagai upaya meminimalisir dampak timbulnya konflik sosial dan upaya penyelesaiannya	Pemerintahan Umum	1. Peserta masyarakat umum/Generasi Muda (tidak membatasi peserta dari penyandang disabilitas); 2. Tempat pelaksanaan di Kapanewon/Kalurahan; 3. Jumlah peserta 50 orang; 4. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat diakses penyandang disabilitas.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	PIWK
14	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Bantuan sosial alat bantu dengar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang disabilitas sensorik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami kerusakan pendengaran ringan atau karena faktor usia rusak/berkurang fungsi indera pendengaran	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PIWK
15	Prasarana Fisik	Pembangunan Pariwisata	Urusan Keistimewaan		Dinas Pariwisata	DAIS